

Nama: Aradia Rosalino

NPM: 2213031009

CASE STUDY PERTEMUAN 9

1. Analisis Penyebab Kegagalan Implementasi Kebijakan Making Indonesia 4.0

Kegagalan mendorong pertumbuhan signifikan di sektor prioritas Making Indonesia 4.0 kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor kunci berdasarkan teori kebijakan industri. Pertama, terdapat "pilot trap", yaitu dimana banyak perusahaan hanya melakukan uji coba teknologi canggih tanpa skala penuh, sehingga produktivitas dan dampak ekonomi terbatas. Kedua, keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang masih memerlukan pelatihan dan reskilling besar-besaran membatasi adopsi teknologi baru secara efektif. Ketiga, infrastruktur digital yang belum merata serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung integrasi lintas sektor menyebabkan hambatan implementasi. Keempat, kurangnya kolaborasi dan ekosistem inovasi yang solid antara pemerintah, industri, dan institusi riset memperlambat transfer teknologi dan inovasi.

2. Perbandingan dengan Vietnam dan Korea Selatan

Vietnam dan Korea Selatan memiliki pendekatan kebijakan industri yang lebih efektif karena mengedepankan pendekatan terintegrasi dan kolaboratif. Vietnam berfokus pada insentif investasi asing langsung (FDI) yang membawa teknologi dan keterampilan baru secara cepat, juga membangun kawasan industri yang terorganisasi. Korea Selatan menguatkan pendidikan dan riset teknologi sejak dini, menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung industri manufaktur canggih. Kedua negara menempatkan pembangunan SDM dan digitalisasi infrastruktur sebagai prioritas utama, sekaligus melibatkan sektor swasta secara aktif dan mengedepankan kebijakan pasar yang mendukung kompetisi sehat dan adopsi teknologi berbasis hasil riset lokal.

3. Rancangan Kebijakan Industri Alternatif untuk Indonesia

Kebijakan alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia meliputi:

- a. Peningkatan SDM dan Pelatihan. Alokasikan investasi besar untuk pelatihan skill digital dan teknis di sektor manufaktur, dengan program skala nasional dan regional yang terintegrasi bersama industri.
- b. Penguatan Infrastruktur Digital dan Fasilitas Industri. Percepat pembangunan infrastruktur digital merata terutama di kawasan industri prioritas dan daerah penyangga.
- c. Pendirian Kawasan Industri 4.0 Berbasis Riset dan Inovasi. Bangun zona industri yang mengakomodasi kolaborasi riset, startup teknologi, dan manufaktur canggih untuk menciptakan ekosistem inovasi.

- d. Insentif untuk Skala dan Komersialisasi Teknologi. Beri insentif fiskal dan nonfiskal supaya perusahaan melewati pilot trap dan melakukan adopsi teknologi secara luas.
- e. Kolaborasi Pemerintah-Swasta-Akademia. Bentuk koordinasi intensif antar pemangku kepentingan untuk pengembangan teknologi dan penerapan kebijakan yang adaptif.

Rasionalnya adalah mengatasi kelemahan dalam SDM, infrastruktur, dan ekosistem inovasi untuk mendorong transformasi manufaktur yang berkelanjutan dan kompetitif. Kebijakan ini menggunakan instrumen pelatihan, pembangunan infrastruktur, insentif fiskal, zona industri khusus, dan kolaborasi multi-stakeholder agar Indonesia keluar dari jebakan deindustrialisasi dini dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara pesaing.